
Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Lakban di Kecamatan Ratatotok

Nadia F. Tongkotow¹
Welly Waworundeng²
Alfon Kimbal³

ABSTRAK

Kolaborasi dari pemerintah dan masyarakat lokal juga sangat di perlukan untuk andil dalam mengembangkan, memberi kontribusi, serta menjaga kegiatan pariwisata agar dapat beriringan dengan nilai-nilai budaya masyarakat lokal, seperti dengan kedatangan wisatawan asing ke objek wisata, wisatawan tersebut akan memasukan budaya mereka, sikap pemerintah apakah akan menerima, mengusir atau membicarakan dengan masyarakat setempat. Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan salah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki objek wisata strategis dan sangat potensial untuk dikelola, dikembangkan dan dipasarkan. Potensi obyek wisata yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara sangat beragam, terdiri dari obyek wisata daerah pantai, dataran rendah dan pegunungan yang terdapat di beberapa Kecamatan. Pengembangan pariwisata Pantai Lakban yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara ternyata kurang melibatkan dan kurang memperhatikan masyarakat desa Ratatotok Timur. Hal ini didukung oleh fakta empirik bahwa pengambilan keputusan pengembangan pariwisata di Pantai Lakban dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tenggara tanpa melibatkan masyarakat desa Ratatotok Timur. Sehingga, aspirasi-aspirasi masyarakat yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata di Pantai Lakban tidak terakomodasi dengan baik. Masyarakat hanya dihimbau untuk turut serta menjaga dan memelihara hasil-hasil pembangunan, yang notabene tidak berdampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat desa Ratatotok Timur. Akhirnya, Pantai Lakban belum mampu memberikan manfaat yang optimal dalam meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat desa Ratatotok Timur.

Kata Kunci: Collaborative Governance; Wisata, Pantai Lakban

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Pengembangan dan pendayagunaan pariwisata secara optimal mampu meningkatkan kawasan wisata tersebut menjadi lebih baik sehingga menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Pengembangan kawasan wisata ini dimaksudkan untuk menambah keindahan dari tempat wisata tanpa harus merusak ekosistem alam yang ada. Pengelolaan dan pemasaran yang baik adalah salah satu cara untuk mengembangkan kawasan wisata supaya dapat lebih dikenal oleh masyarakat. Sebagian kota-kota besar di Indonesia memanfaatkan dan mengembangkan sektor pariwisata alam sebagai daya tarik dan aset bagi pemasukan daerah. Pertumbuhan ekonomi, mempertimbangkan hal tersebut maka penanganan yang baik sangat diperlukan dalam upaya pengembangan obyek-obyek wisata di Indonesia. Para pelaku pariwisata mulai melakukan tindakan pengembangan dengan penelitian, observasi terhadap obyek-obyek wisata di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan guna mengetahui potensi dan permasalahan yang ada pada setiap obyek untuk kemudian mencari solusinya.

Kegiatan pariwisata merupakan kegiatan yang strategis untuk dikembangkan di Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya yang terdapat di Desa Ratatotok Timur di kecamatan Ratatotok, dalam upaya meningkatkan lapangan pekerjaan, melestarikan objek wisata serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara. Objek wisata Pantai Lakban merupakan objek wisata andalan Kabupaten Minahasa Tenggara yang terletak di Desa Ratatotok Timur, Kecamatan Ratatotok. Pada dasarnya, Pantai Lakban yang mulai dikembangkan pada 1996 oleh PT. Newmont Minahasa Raya (PTNMR) untuk meningkatkan perekonomian yang berkelanjutan bagi masyarakat Ratatotok Timur pasca penutupan tambang oleh PT. Newmont Minahasa Raya.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata juga telah mengatur bahwa masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas menjadi pekerja/buruh, konsinyasi, dan pengelolaan. Sehingga, pengembangan pariwisata di Pantai Lakban seharusnya bisa membawa manfaat ekonomi bagi peningkatan mutu hidup masyarakat desa Ratatotok Timur.

Pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dibawah kepemimpinan Bupati JS dan Wakil Bupati RK, telah menetapkan pariwisata sebagai salah satu sektor andalan perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara. Hal tersebut tercantum dalam Misi Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 atau dikenal sebagai 5 (lima) sukses, pada poin ketiga yaitu Sukses Perekonomian, sebagai berikut: "Mewujudkan Perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian, perkebunan (kelapa) dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif (Sukses Perekonomian)"

Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2033 menyatakan bahwa tujuan penataan ruang di Kabupaten Minahasa Tenggara adalah mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan terpadu di Kabupaten Minahasa Tenggara yang mengedepankan Agroindustri, Perikanan, dan Pariwisata.

Dalam Agow, (2016) pengembangan pariwisata di Pantai Lakban, pemerintah harus melibatkan masyarakat khususnya masyarakat desa Ratatotok Timur karena masyarakat Desa Ratatotok Timur banyak mengetahui tentang kondisi Pantai Lakban dan sekitarnya yang bermanfaat bagi pengembangan pariwisata berkelanjutan di Pantai Lakban. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil pembangunan, hingga evaluasi sangat

menentukan keberlanjutan pengembangan pariwisata di Pantai Lakban. Masyarakat juga menentukan kesejahteraan serta peningkatan mutu hidup yang bisa dinikmati oleh masyarakat serta perolehan manfaat ekonomi yang bisa diterima oleh pemerintah.

Maka dari itu pemerintah juga harus mengelola dengan baik wisata pantai Lakban, karena jika pengeloalannya baik maka akan memperoleh kesetaraan dalam memperoleh hak bagi setiap masyarakat karna tidak sedikit masyarakat yang mencari nafka di pantai Lakban, juga untuk penyediaan tempat berjualan, bahkan juga dalam pengelolaan keamanan pantai yg terkontrol agar para wisatawan merasa aman setiap kali ke pantai lakban, juga kebersihan pantai harus diperhatikan. Pemerintah juga harus memikirkan dengan baik apa saja langkah-langka yang perlu diambil dalam pengelolaan pantai Lakban dalam tujuan semakin memaksimalkan kinerja pemerintah. tujuan utama dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Lakban Di Kecamatan Ratatotok.

Tinjauan Pustaka ***Collaborative Governance***

Menurut Gray dalam Haryono, (2012: 48) Kolaborasi dimaknai sebagai kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab dimana pihak-pihak yang berkolaborasi memiliki tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat. Adanya *collaborative governance* ini memunculkan sifat adaptif terhadap satu persoalan yang menuntut pemecahan berbagai berbagai pihak atau instansi terhadap suatu persoalan yang bisa dibawa kedalam bentuk-bentuk *collaborative governance* yang bervariasi antara lain: manajemen, komunikasi, keterlibatan wakil rakyat, negosiasi, regulasi, dan bentuk kolaborasi lainnya yang mencakup berbagai stakeholder

yang ikut terlibat dalam pelaksanaan program ataupun kebijakan.

Menurut Purwanti, (2016:174) Pemerintah tidak hanya mengandalkan pada kapasistas internal yang dimiliki dalam penerapan sebuah kebijakan dan pelaksanaan program. Keterbatasan kemampuan, sumberdaya maupun jaringan yang menjadi faktor pendukung terlaksananya suatu program atau kebijakan, mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan sesama pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat dan komunitas masyatakat sipil sehingga dapat terjalin kerjasama kolaboratif dalam mencapai tujuan program atau kebijakan.

Menurut Ansell dan Gash, (2007:544) *Collaborative Governance* adalah sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik. Definisi tersebut dapat dirumuskan beberapa kata kunci yang menekankan pada enam karekteristik, antara lain :

- 1) Forum tersebut diinisiasi atau dilaksanakan oleh lembaga publik maupun aktor-aktor dalam lembaga publik.
- 2) Peserta di dalam forum tersebut juga termasuk aktor non publik.
- 3) Peserta terlibat secara langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan dan keputusan tidak harus merajuk pada aktor-aktor publik.
- 4) Forum terorganisir secara formal dan pertemuan diadakan secara bersama-sama.
- 5) Forum bertujuan untuk membuat keputusan atas kesepakatan bersama, dengan kata lain forum ini berorientasi pada konsensus.
- 6) Kolaborasi berfokus pada kebijakan publik maupun manajemen public.

Agrawal dan Lemos (2007) dalam Balogh, S, dkk, 2011:3) *Collaborative Governance* tidak hanya terbatas pada stakeholder yang terdiri dari pemerintah dan non pemerintah tetapi juga terbentuk atas adanya "*multipartner governance*" yang meliputi sektor privat, masyarakat dan komunitas sipil dan terbangun atas sinergi peran stakeholder dan penyusunan rencana yang bersifat *hybrid* seperti halnya kerjasama public-privat dan privat-sosial.

Menurut Balogh, (2011:2) *Collaborative Governance* merupakan sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan dan atau instansi publik, institusi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja.

Robertson dan Choi (2010) dalam Kumorotomo, (2013:10) *Collaborative Governance* sebagai proses kolektif dan egalitarian dimana setiap partisipan di dalamnya memiliki otoritas substansi dalam pengambilan keputusan dan setiap stakeholder memiliki kesempatan yang sama untuk merefleksikan aspirasinya dalam proses tersebut.

Pengelolaan Pariwisata

Dalam Hayun, (2001) Pengelolaan merupakan suatu proses yang membantu merumuskan kebijakan-kebijakan dan pencapaian tujuan. Peran pemerintah dalam pengelolaan pariwisata, seperti melaksanakan pembinaan kepariwisataan dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan.

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan No 4 Tahun 2012, kegiatan pengelolaan dan pengembangan pariwisata alam dapat dilakukan di taman nasional dengan memperhatikan asas kelestarian. Pengelolaan pariwisata alam di Taman Nasional dapat dilakukan di zona pemanfaatan. Hal yang harus dilakukan dalam kegiatan pengelolaan

pariwisata alam terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

1. Akomodasi, tempat seseorang untuk tinggal sementara.
2. Jasa Boga dan Restoran, industri jasa di bidang penyelenggaraan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial.
3. Transportasi dan Jasa Angkutan, industri usaha jasa yang bergerak di bidang angkutan darat, laut dan udara.
4. Atraksi Wisata, kegiatan wisata yang dapat menarik perhatian wisatawan atau pengunjung.
5. Cenderamata (Souvenir), benda yang dijadikan kenang-kenangan untuk dibawa oleh wisatawan pada saat kembali ke tempat asal.
6. Biro Perjalanan, badan usaha pelayanan semua proses perjalanan dari berangkat hingga kembali.

Menurut Suryaningsih (2014), dalam berwisata alam ada beberapa etika yang harus dihormati, yaitu:

- Sebaiknya ikuti jalur trekking yang telah ditentukan, atau berjalanlah di
- atas boardwalk yang telah dibuat khusus untuk menjelajahi kawasan pelestarian alam. Jangan memberi makan hewan-hewan liar.
- Buanglah sampah pada tempatnya.
- Hindari memetik atau mengambil bagian tanaman apa pun yang ditemui
- sepanjang perjalanan. Bayarlah tiket masuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Analisis SWOT

Dalam Rangkuti, (2006) Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan dari

perencana. Dengan demikian perencana strategis (*Strategic Planner*) harus menganalisis faktor-faktor strategis (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Kekuatan (*strength*) adalah unsur dari potensi sumberdaya yang dapat melindungi dari persaingan dan dapat menciptakan suatu kemajuan didalam suatu kegiatan atau usaha. Kelemahan (*weakneses*) adalah unsur dari potensi sumberdaya yang tidak dapat bersaing sehingga tidak dapat menciptakan suatu kemajuan didalam kegiatan atau usaha. Peluang (*opportunity*) adalah unsur lingkungan yang dapat memungkinkan suatu kegiatan atau usaha untuk mendapatkan keberhasilan yang tinggi. Ancaman (*threat*) adalah unsure lingkungan yang dapat mengganggu atau menghalangisuatu kegiatan atau usaha sehingga dapat menggagalkan kegiatan atau usaha bila tidak segera diambil tindakan pengelola yang tegas.

Konsep Wisata Pantai

Menurut John O. Simond, (1978) Obyek wisata pantai adalah elemen fisik dari pantai yang dapat dijadikan lokasi untuk melakukan kegiatan wisata, obyek terse but yaitu:

1. Pantai, merupakan daerah transisi antara daratan dan lautan. Pantai merupakan primadona obyek wisata dengan potensi pemanfaatan, mulai dari kegiatan yang pasif sampai aktif.
2. Permukaan laut, terdapatnya ombak dan angin sehi ngga permukaan tersebut memiliki potensi yang berguna dan bersifat rekreatif.
3. Daratan sekitar pantai, merupakan daerah pendukung terhadap keadaan pantai, yang berfungsi sebagai tempat rekreasi dan olah raga darat yang membuat para pengunjung akan lebih lama menikmatinya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. informan terdiri dari : Kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan, Camat, Aparat kepolisian, Hukum tua, BPD, dan

Tokoh masyarakat juga masyarakat dan pengunjung.

Yang menjadi fokus pada Penelitian di lapangan sesuai dengan jenis penelitian kualitatif. Maka penelitian ini akan di fokuskan pada Collaborative Governance dalam Pengelolaan Wisata Pantai Lakban di Kecamatan Ratatotok, berdasarkan teori Menurut Ansell dan Gash, (2007:544) *Collaborative Governance* adalah sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset public.

Dalam Husaini Usman dan Akbar Purnomo (2017: 130) Tujuan analisis data ialah untuk mengungkapkan data apa yang masih perlu dicari, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru, dan kesalahan apa yang harus segera diperbaiki

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Lakban di Kecamatan Ratatotok penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif proses pengumpulan dan penelitian ini adalah Observasi, wawancara, Dokumentasi. Hal ini ditunjukkan dengan hasil penelitian yang diukur dengan hasil Wawancara. Berdasarkan teori menurut Ansell dan Gash, (2007:544) *Collaborative Governance* adalah sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik. Definisi tersebut dapat dirumuskan beberapa kata kunci yang

menekankan pada enam karakteristik, antara lain :

- 1) Forum tersebut diinisiasi atau dilaksanakan oleh lembaga publik maupun aktor-aktor dalam lembaga publik.
- 2) Peserta di dalam forum tersebut juga termasuk aktor non publik.
- 3) Peserta terlibat secara langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan dan keputusan tidak harus merujuk pada aktor-aktor publik.
- 4) Forum terorganisir secara formal dan pertemuan diadakan secara bersama-sama.
- 5) Forum bertujuan untuk membuat keputusan atas kesepakatan bersama, dengan kata lain forum ini berorientasi pada konsensus.
- 6) Kolaborasi berfokus pada kebijakan publik maupun manajemen public.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sampai saat ini memang Obyek Wisata Pantai Lakban masih beroperasi walaupun dengan pengunjung yang berkurang drastis akibat banyaknya Destinasi Wisata alam yang baru dan juga merupakan dampak adanya Covid-19.

- a) Forum tersebut diinisiasi atau dilaksanakan oleh lembaga publik maupun aktor-aktor dalam lembaga publik.

Seperti yang didapati selama penelitian berlangsung bahwa yang menjadi aktor utama dalam pengelolaan pantai lakban adalah pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Pemerintah daerah kabupaten Minahasa Tenggara berperan penting dalam pengelolaan tempat wisata pantai lakban. Inisiasi sendiri adalah bagaimana tahapan atau langkah awal pemerintah mengoperasikan dan mengelolah Obyek Wisata Pantai Lakban. Seperti yang diketahui bahwa pantai Lakban merupakan hasil pembangunan yang dilakukan oleh PT. Newmont Minahasa Raya. Setelah PT. Newmont Minahasa Raya tutup, kemudian dilanjutkan Oleh Pemerintah. Yang tujuannya adalah:

- 1) Untuk menciptakan reklamasi hutan yang dapat berlangsung terus menerus setelah tambang ditutup;
- 2) Untuk menciptakan industri baru bagi masyarakat yang dapat berlangsung terus menerus setelah tambang ditutup; dan
- 3) Untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan percaya diri setelah penutupan

Pantai Lakban menjadi sumber utama pendapatan asli daerah (PAD) dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tenggara serta menjadi salah satu sumber mata pencarian masyarakat desa Ratatotok Timur. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2033 menyatakan bahwa tujuan penataan ruang di Kabupaten Minahasa Tenggara adalah mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan terpadu di Kabupaten Minahasa Tenggara yang mengedepankan Agroindustri, Perikanan, dan Pariwisata. Adapun Pantai Lakban dikelola dan dikembangkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tenggara. Pemerintah hendaknya melakukan pengelolaan atau juga pengawasan yang baik terhadap kekayaan Negara tersebut. Pengelolaan asset wilayah pariwisata Yaitu Pantai lakban yang berlokasi di Desa Ratatotok Timur belum terkelola dengan baik. Terbukti dengan adanya beberapa bangunan yang sudah tidak pernah di perbaiki baik jembatan ituk menuju ke Pantai juga sudah tidak layak, tidak tersedia air bersih untuk pengunjung. Usaha Untuk Mengelola Pantai tersebut tak lepas dari fungsi atau peranan Pemerintah daerah sebagai aparat yang berkewajiban untuk menjaga keamanan, ketertiban, pengamanan dan Perlindungan. Pemerintah Daerah bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk menjaga dan menertibkan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Berkewajiban :

- 1) Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- 2) Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kapastian hukum;
- 3) Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan asset nasional yang menjadi daya Tarik wisata dan asset potensial yang belum tergal; dan
- 4) Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negative bagi masyarakat luas.

- b) Peserta di dalam Forum Tersebut Juga Termasuk Aktor Non Publik.

Peserta atau aktor Non publik ini dimaksudkan untuk lembaga swasta dan Masyarakat. Kolaborasi dalam mengembangkan tempat wisata sangat penting demi menjaga kelestarian alam. Kerjasama dapat diartikan sebagai suatu bentuk usaha Bersama antara individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan Bersama, kerjasama merupakan sebuah interaksi yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena manusia sendiri merupakan makhluk social yang saling membutuhkan. Namun berdasarkan hasil penelitian dengan wawancara bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bahwa Pantai Lakban memang dulunya merupakan hasil pembangunan dari PT. Newmont Minahasa Raya namun saat ini dikelola oleh Pemerintah Melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dan ditegaskan bahwa Kerjasama Tidak Dilakukan, Pantai Lakban Dulu di kelola oleh PT. Newmont Minahasa Raya setelah PT. Nyumon Raya Sudah Tidak Beroperasi Lagi Barulah diserahkan Ke Dinas Priwisata dan Kebudayaan. Jadi dalam hal pengelolaan pantai lakban ini sudah tidak adalagi

kolaborasi dengan pihak PT. Newmont Minahasa Raya.

Serta didapati faktanya bahwa masyarakat kurang terlibat dalam proses pengelolaan obyek wisata pantai lakban. Maka pernyataan ini menegaskan bahwa ini tidak sesuai dengan pendapat Ansell dan Gash.

- c) Peserta terlibat secara langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan dan keputusan tidak harus merujuk pada aktor-aktor publik.

Dalam poin ketiga ini sangat singkat akan dijelaskan, karena yang memang merupakan penggerak atau pengelola adalah dari dinas sendiri, untuk proses perekrutan petugas dan bahkan kepanitiaan. Semua langsung ditangani oleh Dinas Pariwisata, jadi tidaklah sesuai dengan teori Ansell dan Gash yang pada kata kunci yang ketiga.

- d) Forum terorganisir secara formal dan pertemuan diadakan secara bersama-sama.

Sudah pastilah jawaban mengenai poin ke-empat ini tidak sesuai. Karena setiap kali ada kegiatan hanya dari pihak pemerintahlah yang terlibat secara menyeluruh dan tidak melibatkan Masyarakat bahkan Pemerintah Desa. Karena seperti apa yang didapati dalam hasil penelitian bahwa disaat Pemerintah Desa yang bertugas dalam pengelolaan maka timbul yang namanya sikap masabodoh dari warga sekitar dalam hal pembayaran tiket masuk atau yang sering disebut karcis. Padahal jika berbicara kolaborasi maka setidaknya melibatkan oknum pemerintah desa dan juga masyarakat dalam hal pengelolaan tersebut.

- e) Forum bertujuan untuk membuat keputusan atas kesepakatan bersama, dengan kata lain forum ini berorientasi pada konsensus

Dalam poin kelima ini sangat mudah untuk dijelaskan karena jawaban yang hampir mirip dengan poin-poin sebelumnya. Karena forum ini membuat kesepakatan sepihak, keputusan sepihak, dengan tidak melibatkan Pemerintah Desa dan bahkan masyarakat, buktinya sendiri

dapat dilihat bahwa tidak ada keterlibatan dari masyarakat dalam hal kepengurusan, dan bahkan kepanitiaan jika diadakan suatu kegiatan.

- f) Kolaborasi berfokus pada kebijakan publik maupun manajemen public.

Dalam poin ke-enam ini dapat disimpulkan bahwa tujuan utama yang sebenarnya dari pengolahan pantai lakban sendiri adalah untuk menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat yang ada, namun fakta yang ada dilapangan menunjukkan bahwa dalam hal petugas pengelola obyek wisata adalah pilihan dari Dinas yang sudah disiapkan. Dan untuk masyarakat hanya diberikan tempat untuk mendirikan kios-kios untuk berjualan. Dan bagi beberapa yang mempunyai kapal atau perahu diberikan kesempatan untuk menyewakannya menjadi alat transportasi bila ada pengunjung yang ingin pergi ke pasir putih. Pengembangan Obyek Wisata sebenarnya juga membawa keuntungan bagi masyarakat. Dengan adanya pengembangan pariwisata tersebut dapat membawa manfaat berupa menambah lapangan pekerjaan, menambah kesempatan membangun usaha, dan meningkatkan serta menumbuhkan kebudayaan yang ada didaerah pengembangan pariwisata.

Kebersamaan Pemerintah dan Masyarakat dalam memaksimalkan serta meningkatkan pengembangan Pariwisata pantai Lakban sangat diperlukan untuk pengelolaan dan menjalin hubungan yang baik, karena mengingat bahwa Hanya Pantai Lakban yang memiliki PAD. Karena Pantai Lakban Sekarang sudah Tidak Terlalu terkenal, karena sudah banyak destinasi wisata baru, dulunya banyak yang pergi berwisata di pantai lakban sehingga pendapatannya tinggi, Karena ada Covid-19 kerjasama dengan Pemerintah desa Juga Dengan Bumdes dan kecamatan kalau mereka ingin kerja sama dengan Pemda Boleh Menyiapkan Fasilitas tambahan Seperti Bananabooth dll Itu Bisa Masuk Ke kas Desanya

mereka kalo untuk karcisnya tetap di setor ke pusat.

Tata kelola pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat di desa Ratatotok Timur kurang memusakan, karena dalam hal kepariwisataan masih kurang pelayanan yang bagus masalah terbesar yaitu kurangnya air bersih yang ada di Pantai lakban. Adapun unsur kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata di Pantai Lakban masih kurang. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Pantai Lakban Kabupaten Minahasa Tenggara salah satunya dapat dilihat dari kesempatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk berpartisipasi mulai dari tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil pembangunan. Pada tahap pengambilan keputusan, masyarakat tidak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk turut memutuskan pengembangan pariwisata yang akan dilaksanakan di Pantai Lakban. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hanya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka namun aspirasi-aspirasi tersebut sering tidak didengar oleh pemerintah. Kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam tahap pelaksanaan kegiatan pengembangan pariwisata di Pantai Lakban juga masih kurang. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Pantai Lakban masyarakat hanya memiliki kesempatan untuk terlibat sebagai buruh dari pihak ketiga.

Masyarakat juga tidak diberikan kesempatan untuk terlibat sebagai panitia dalam kegiatan tahunan Kabupaten Minahasa Tenggara, yaitu Festival Bentenan Lakban. Masyarakat Ratatotok Timur yang bertugas sebagai tenaga kontrak (petugas kebersihan) di Pantai Lakban juga hanya ada satu orang. Akan tetapi, masyarakat diberikan kesempatan untuk turut serta menjaga dan memelihara hasil-hasil pembangunan di Pantai Lakban. Dampak positif yang terjadi sekitar pantai lakban yaitu ada beberapa masyarakat juga bias berjualan di area

pantai, namun dampak negative seringkali karena banyaknya pengunjung yang ada seringkali mereka membuang sampah sembarangan sehingga terjadi pencemaran lingkungan, juga kurangnya pengadaan air bersih yang di sediakan untuk pengunjung, petugas pembersihan juga seringkali tidak memperhatikan atau membersihkan area pantai. Berdasarkan Informan diatas dapat diketahui bahwa peran pemerintah dalam fungsi pelayanan kurang maksimal. Unsur kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata di Pantai Lakban terbilang cukup baik. Pada tahap pengambilan keputusan, masyarakat mampu untuk memberikan aspirasi-aspirasi yang bersifat membangun dan sesuai dengan kebutuhan yang ada di Pantai Lakban. Masyarakat juga mampu mengkritisi program pemerintah yang menurut mereka kurang efektif dan tidak tepat sasaran serta mampu memberi solusi dan melihat peluang dari masalah-masalah yang ada di Pantai Lakban. Kemampuan masyarakat tersebut berasal dari pengalaman dan pengetahuan masyarakat terkait kondisi serta hal-hal mendasar yang dibutuhkan untuk pengembangan pariwisata Pantai Lakban. Kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam tahap pelaksanaan kegiatan juga terbilang cukup baik. Pada tahap pelaksanaan kegiatan, masyarakat memiliki kemampuan untuk terlibat sebagai buruh dalam membangun tribun, aula dan gapura di Pantai Lakban. Masyarakat juga memiliki kemampuan untuk turut serta menjaga dan memelihara hasilhasil pembangunan. Masyarakat juga mampu untuk terlibat dalam kegiatan Festival Bentenan Lakban dengan menampilkan tarian katrili, pameran souvenir atau cenderamata, serta perahu hias.

Kolaborasi antara ketiga pihak seperti yang diketahui bahwa menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bahwa tidak ada kerjasama antara Pemerintah dan PT. Newmont Minahasa Raya. Jadi saat ini pengelolaan Obyek Wisata Pantai Lakban sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah melalui Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan. Sedangkan dengan Masyarakat masih kurang baik, karena masyarakat tidak terlibat aktif dalam pengelolaan. Karena dari pemerintah sendiri yang menyiapkan petugas dalam pengelolaan Obyek Wisata Pantai Lakban ini. Masyarakat hanya diberikan tempat untuk berjualan, dan ketika ada kegiatan masyarakat hanya menjadi penonton dan tidak diikutsertakan dalam kepanitiaan.

Jadi dalam pembahasan ini sangat tepat bila dikatakan bahwa tidak ada kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Dan untuk PT. Newmont telah dijelaskan bahwa tidak adalagi sangkut pautnya dengan obyek wisata ini. Karena obyek wisata ini memang dibangun oleh PT. Newmont namun karena perusahaan tersebut ditutup dan obyek wisata ini sudah tidak terkelola dengan baik dan kemudian ditinggalkan oleh perusahaan kepada Pemerintah maka sepenuhnya kepengurusan dan pegelolaan adalah tugas dari pemerintah.

Penutup Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dari pembahasan hasil peneliiian:

1. Ternyata baik dari Pemerintah, pihak swasta dan juga masyarakat tidak saling bekerja sama dalam membangun atau mengelola pantai lakban, hanya pihak pemerintah saja yang mengelola didalamnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
2. Keterlibatan dari Pihak Swasta seperti Lembaga swadaya masyarakat. Namun, ternyata mereka mencemarkan nama baik Pt Newmont. Dari pihak LSM mengatakan bahwa PT Newmont Minahasa Raya melakukan pencemaran lingkungan, limbahnya hanya di buang ke laut. Namun, PT Newmont Minahasa Raya membantah karena selama pertambangan berlangsung PT Newmont Minahasa Raya sudah mengikuti persyaratan yang di tentukan pemerintah. Dan membantah bahwa penduduk

sekitar yang sakit, menderita kelainan akibat memakan ikan-ikan di pantai Buyat yang tercemar. Peralannya secara berkala Pt Newmont Minahasa Raya sudah melakukan pemantauan lingkungan. Diantaranya bekerjasama dengan pemerintah Sulawesi Utara dan Universitas Sam Ratulangi, Mereka mengambil Sampling Ikan air laut maupun di tubuh ikan, sementara itu penelitian wahana lingkungan hidup dan LSM lainnya yang bergerak dilingkungan hidup yang menyatakan ada kandungan merkuri di air laut ditanggapi pihak PT Newmont sebagai pernyataan yang bisa dilakukan siapapun.

3. pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah menyangkut urusan pilihan dalam hal ini sektor pariwisata, meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata dapat memberi manfaat dan keuntungan bagi pembangunan pariwisata berkelanjutan.
4. Kolaborasi antara ketiga pihak dalam mengelola pantai lakban yang ada di Desa Ratotok Timur bisa di sebut dengan kemitraan Pemerintah-Swasta-Masyarakat merupakan model oprasional sinergis untuk mencapai pembangunan secara berkelanjutan dimana tiga pihak secara Bersama-sama mengembangkan unit usaha/layanan yang saling menguntungkan memberikan

manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan *collaborative Governance* dalam pengelolaan wisata pantai lakban di Kecamatan Ratatotok sebagai berikut:

1. Tatakelola pemerintah daerah kabupaten Minahasa Tenggara dalam pengaturan, pelayanann, pemberdayaan masyarakat. Diharapkan harus lebih tegas lagi dan lebih konsisten dalam menjalankan tugas dan kewajiban.
2. Diharapkan pemerintah daerah kabupaten Minahasa Tenggara harus benar-benar bertindak secara cepat dalam mengatasi masalah ini, agar ada kesinambungan dalam pemerintah untuk mengelola dengan baik wisata pantai agar terjaga kelestariannya.
3. Diharapkan Pemerintah Daerah Minahasa Tenggara Juga dapat memperhatikan dampak positif dan dampak negatif Yang sering terjadi agar terkelola dengan baik.
4. Ada baiknya jika pemerintah-swasta-masyarakat salalu saling menopang agar tercipta pembangunan wilayah yang baik

Daftar Pustaka

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). *Collaborative Governance dalam teori dan praktik*
- Balogh, Stephen, dkk. 2011. *Karangka kerja untuk tatakelola kolaboratif*, Journal of Public Administration Research and Theory.
- Haryono, N. (2012). *Jejaring untuk membangun kolaborasi sektor publik*. Jurnal Jejaring Administrasi Publik.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2013. *Akuntabilitas Birokrasi Publik :Sketsa pada masa transisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pitana, I Gde. dan Surya Diarta, I Ketut. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata..*
- Purwanti, Nurul D, 2016. *Collaborative Governance (Kebijakan Publik dan*

Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer)

- Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustakabarupers.
- Supriyanto, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis)*.
- Spillane, James J, 1995. *Ekonomi Pariwisata: Sejarah dan Prospeknya. Cetakan Delapan*.
- Usman, Husainidan Akbar, Purnomo.2017. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sumber lain :

- Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2033.
- Peraturan Menteri Kehutanan No 4 Tahun 2012, kegiatan pengelolaan dan pengembangan pariwisata alam dapat dilakukan di taman nasional dengan memperhatikan asas kelestarian.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 tahun 2011
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tentang Kepariwisata.

Sumber lain :

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019
- Merry, Virginia, Agow. 2017. *Partisipasi Masyarakat dalam pengembangan Pariwisata di Pantai Lakban Kabupaten Minahasa Tenggara*.
- Mamonto, Pretty, Sompie, Peggy Mekel. 2012. *Sustainable Development for Post Closure (a case study of PT. Newmont Minahasa Raya)*. Australian Centre for Geomechanics, Brisbane.
- Website resmi Kabupaten Minahasa Tenggara 2020 mitrakab.go.id

Sumber lain:

<http://www.google.com/amp/s/docplayer.info/amp/73596103-Faktor-faktor-internal-pengembangan-objek-wisata-pantai-lakban-kabupaten-minahasa->

[tenggara-sebagai-objek-wisata-andalan.html](http://www.google.com/amp/s/docplayer.info/amp/73596103-Faktor-faktor-internal-pengembangan-objek-wisata-pantai-lakban-kabupaten-minahasa-)